Nama : Jhosua Stefanus Marchellino

NPM : 2012011065

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika S.Pd.,M.Pd.

Tugas : Membuat Artikel

**Negara Indonesia Adalah Negara Hukum**

**Yang Mewajibkan Semua Warga Negara Taat Pada Hukum,**

**Tidak Bertindak Semena-Mena**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan bunyi UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3. Untuk itu, masyarakat tidak semena-mena melanggar hukum yang dapat merugikan dan membahayakan bangsa dan negara. Segala kehidupan yang ada di masyarakat harus selalu berdasarkan kepada hukum.

Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan di mata hukum. Hal ini pun berlaku untuk aparat penegak hukum negara tanpa kecuali.

 Sejalan dengan pernyataan ini, Presiden Joko Widodo juga mengatakan, saat menjalankan tugas aparat sejatinya dilindungi oleh hukum. Presiden juga meminta aparat tak sedikit pun mundur dalam upaya penegakkan hukum. Namun, presiden juga mengingatkan agar mereka patuh pada aturan hukum selama menjalankan tugas.

 Hal ini presiden sampaikan saat menanggapi tewasnya enam simpatisan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada 7 Desember 2020 serta empat warga Sigi Sulawesi Tengah, dalam teror yang terjadi 27 Oktober yang lalu.

 Aparat harus melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangan secara wajar serta terukur saat bertugas. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil.

Oleh karena itu, hukum tidak boleh mengabaikan keadilan masyarakat, semua sama di depan mata hukum. 3 Macam ide dasar dari sebuah hukum :

* dasar keadilan
* kemanfaatan
* kepastian

Jika terjadi perbedaan pendapat tentang proses penegakkan hukum, presiden meminta agar seluruh pihak mengikuti prosedur hukum yang berlaku, supaya proses peradilan diikuti dan keputusan pengadilan dihargai.

Seandainya diperlukan keterlibatan lembaga independen, terdapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat. Masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran hukum harus dihukum setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya. Demikian juga, dengan pejabat atau petinggi negara, aparat negara dan aparat hukum yang melakukan pelanggaran pun harus mendapat sanksi atau hukuman yang setimpal dengan yang dilakukannya.

Jadi, hukum harus berlaku seadil-adilnya untuk setiap warga negara Indonesia. Sehingga hukum benar-benar dirasakan manfaatnya, dan masyarakat benar-benar merasa tenang dan nyaman karena adanya kepastian hukum.